

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PERTANIAN TERKINI DALAM PENGEMBANGAN BALAI PERTANIAN DI SEKRETARIAT DAERAH

Suryaningsih¹ Rahmawati Rita² Tri Ramdhani Faisal³ Wahyudin Cecep⁴ Virly
Aprilliyani Neng⁵ Purnamasari Irma⁶ Goris Gotfridus Seran⁷

¹Suryaningsih, suryaningsihputri594@gmail.com

ABSTRAK

Melalui program penambahan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) baru di kawasan Nanggung-Sukajaya, para penyuluh diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pembentukan BPP baru yang direncanakan berada di tengah-tengah wilayah Nanggung-Sukajaya. Analisis data diterapkan dengan menggunakan model analisis interaktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor cukup baik dalam mempercepat pembuatan regulasi atau kebijakan untuk memajukan pembangunan di wilayah tersebut. BPP sebagai pusat dukungan bagi para petani dalam meningkatkan hasil tani mereka, membuat usulan penambahan BPP baru menjadi sangat efektif dalam mengoptimalkan kinerja para penyuluh guna memajukan para petani. Untuk memastikan BPP dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pencapaian dan kelangsungan pembangunan pertanian, terutama di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan optimalisasi kinerja BPP ke depan. Salah satu langkah penting adalah menguatkan fungsi BPP Prati sebagai tempat untuk membangun kolaborasi dan konsultasi di bidang bisnis pertanian.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyuluh

PENDAHULUAN

Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Seiring dengan evolusi zaman dan kompleksitas tantangan global, keberlanjutan sektor pertanian menjadi fokus utama bagi pembuat kebijakan. Salah satu langkah krusial dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan adalah melalui penerapan kebijakan pertanian terkini yang relevan dan efektif.

Balai Pertanian, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan, riset, dan pengembangan di sektor pertanian, memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan pertanian terkini. Dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pasar, balai pertanian menjadi garda terdepan dalam menjamin produksi pertanian yang efisien, berkelanjutan, dan kompetitif.

Penyuluhan secara umum dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji sistem dan proses transformasi yang terjadi pada individu maupun masyarakat, dengan tujuan mewujudkan perubahan yang positif sesuai dengan harapan yang diinginkan (Setiana, 2005). Dalam konteks ini, penyuluhan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan memberikan motivasi serta ilmu agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) telah beberapa kali diubah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 (tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pertanian terkini dalam pengembangan balai pertanian, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari teknologi pertanian, manajemen sumber daya, hingga keberlanjutan lingkungan. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan tersebut serta dampak potensialnya terhadap perkembangan pertanian secara keseluruhan.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas beberapa aspek utama terkait implementasi kebijakan pertanian terkini dalam pengembangan balai pertanian, dengan memadukan wawasan dari literatur terkait dan studi kasus yang relevan. Pemahaman yang komprehensif tentang topik ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang mendalam bagi pembaca mengenai pentingnya dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan melalui peran balai pertanian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika implementasi kebijakan pertanian terkini di tingkat lokal, regional, dan nasional, diharapkan kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terwujud secara lebih efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atanus Fidelis (2018), tujuannya adalah untuk menilai kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) yang diterapkan di Kabupaten TTU. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus eksploratif. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sari Tani di Kabupaten TTU masih jauh dari optimal atau belum mencapai tingkat yang diharapkan karena sumber daya manusia (SDM) yang buruk di UPST dan kurangnya sosialisasi program, PKM tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan cara rekrutmen Petugas Kesejahteraan Masyarakat (PKM) yang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan PKM yang tidak bermukim di desa. Selain itu, ada kesalahan yang dilakukan saat membentuk

kelompok tani, yang mengganggu program. Studi ini melakukan survei di tiga kecamatan, yang merupakan representasi dari tiga keketoratan di Kabupaten TTU.

Winarsih Ahdah, Mastuti Djaka, dan Yunandar Tri Detia (2020) melakukan penelitian menggunakan program Kostratani yang memanfaatkan teknologi informasi (IT) untuk meningkatkan fungsi, peran, dan tanggung jawab Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menjadikannya lebih penting dan strategis. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang kinerja BPP Prafi setelah diubah menjadi BPP Kostratani di Distrik Prafi. Informasi penelitian termasuk administrator Kostratani, Kepala BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petani, Pengelola Kostratani Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari.

Oneng Anwarudin, Sumardjo, Arif Satria, dan Anna Fatchiya (2020) melakukan analisis deskriptif mengenai peran petani muda dalam penyuluhan pertanian dan keberlanjutan agribisnis. Mereka juga menganalisis karakteristik, kapasitas kewirausahaan, peran penyuluhan pertanian, dan unsur-unsur eksternal yang memengaruhi keberlanjutan agribisnis petani muda. Data diuji dengan analisis regresi berganda dan statistik deskriptif. Petani muda, dukungan eksternal, dan penyuluhan pertanian adalah responden penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani muda masih menganggap tingkat peran penyuluhan pertanian, faktor eksternal, kemampuan kewirausahaan, dan sedikit peluang keberlanjutan agribisnis.

Novianda Fawaz Khairunnisa, Zumi Saidah, Hapi Hapsari, and Eliana Wulandari (2021) melakukan penelitian untuk meneliti peran seorang penyuluh yang berperan untuk petani jagung dan mengevaluasi dampaknya dalam peningkatan memproduksi usahatani jagung. Analisis deskriptif dengan skala diferensial semantik dan analisis regresi digunakan. Penelitian ini melibatkan delapan puluh petani jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyuluh pertanian sebagai katalisator dinilai secara wajar. komunikator, konsultan, dan

organisasitor. Mereka juga dinilai cukup baik sebagai motivator, edukator, dan fasilitator.

Eliga Paginian, Dewi Kurniati, dan Abdul Hamid A. Yusra (2021) melakukan penelitian yang bertujuan meningkatkan hasil penyuluh pertanian Kabupaten Landak. Penelitian ini memanfaatkan survei kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dari 47 petugas dinas pertanian Kabupaten Landak, 13 parapatani, 13 ketua kelompok tani, dan 2 karyawan. Hasil menunjukkan bahwa evaluasi kinerja penyuluh di Kabupaten Landak dilakukan sekitar tahun 2018. tetap mengindikasikan adanya beberapa penyuluh yang memiliki kinerja dengan predikat cukup.

METODE PENELITIAN

Kebijakan Publik

Menurut pandangan Nurdin Usman, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang digunakan oleh sistem. Menurut Usman (2002), implementasi adalah lebih dari sekadar melakukan sesuatu. Ini adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan tertentu.

Istilah kebijakan publik memiliki hubungan yang rapat dengan administrasi pemerintahan, karena umumnya kebijakan tersebut diwujudkan dan terdokumentasi dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi. Menurut A. Hoogerwert, kebijakan publik merupakan elemen yang esensial dalam ranah politik, di mana tujuannya adalah untuk mencapai sebuah target tertentu.

Dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu komponen penting dalam mewujudkan kebijakan publik secara keseluruhan adalah tahapan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses

administratif dan politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan melalui metode administrasi politik, menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49).

Van Meter dan Van Horn membuat model terkenal untuk implementasi kebijakan, "A Model of Policy Implementation", yang menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses linear yang dimulai dengan keputusan politik dan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn, seperti yang dijelaskan dalam Suharno (2013: 176-177), berbagai variabel yang saling terkait menentukan seberapa baik hasil kebijakan.

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Komunikasi Antar Organisasi
- 4) Karakteristik Organisasi Pelaksana
- 5) Sikap Para Pelaksana
- 6) Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Metode Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada pembentukan Balai Pertanian Baru di Desa pertengahan Sukajaya dan Nanggung. Informan penelitian ini berasal dari Perangkat Daerah Sekretariat Bogor Bagian Organisasi, dan salah satu penyuluh yang bertugas di daerah Sukajaya. Penelitian ini menggunakan metode purposive untuk memilih sampel dan *snowball*, sebagaimana dijelaskan oleh Irawan (2006:17). Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, yang menurut Sugiyono (2019:18), merupakan cara penelitian yang sesuai pada filsafat postpositivisme, dan penelitian kualitatif lebih menonjolkan pada dampak dari pada generalisasi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara oleh peneliti. menganalisis data dilakukan dengan cara teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman, sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019:322).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendirikan balai pertanian baru, diperlukan regulasi yang ketat agar balai tersebut sah secara hukum. Beberapa regulasi atau peraturan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permenten/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasal 11 dari peraturan ini menyatakan bahwa lembaga penyuluhan pertanian pemerintah terdiri dari: a). Pusat PPSDMP; b). Lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi penyuluhan pertanian di tingkat provinsi; c). Lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota; dan d). Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan.

Pasal 16 1) Balai Penyuluhan Pertanian, yang tercantum dalam Pasal 11 huruf, adalah unit kerja nonstruktural dari dinas yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten atau kota. 2. Menurut ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha. Selain itu, Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai pusat koordinasi pembangunan berbasis kawasan. 1. Menurut ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas berikut: a). Merancang program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan sesuai dengan program nasional. menyebarkan informasi tentang teknologi, metode produksi, dana, dan informasi pasar; e). Untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan karyawan

Dalam Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2024 yang menimbang bahwa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyuluhan tingkat kecamatan telah dibentuk 12 Balai Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian. Dan dengan bertambahnya volume sasaran produksi dan produktivitas

komoditas pertanian, serta ada beberapa lokasi kecamatan dengan potensi pertanian yang cukup tinggi tetapi belum dapat dikembangkan secara optimal salah satunya karena kurangnya penanganan kelembagaan pertanian di wilayah tersebut, ketentuan mengenai jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diubah dan disesuaikan.

Dalam pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Baru Sekretariat Daerah telah melakukan rapat dengan ... pada tanggal 20 Februari 2024 di dalam ruang rapat IV. Dalam pembahasan rapat tersebut membahas beberapa poin, terutamanya adalah pembahasan terkait pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian baru yang berlokasi di pertengahan wilayah antara Balai Pertanian Nanggung dan Balai Pertanian Sukajaya. Beberapa hal yang dibahas untuk evaluasi Balai Pertanian yang sudah ada pada saat ini dan beberapa hal keuntungan dalam pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Baru.

Dimensi Implementasi Kebijakan

Dalam hasil wawancara kepada 3 informan yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa target pembentukan Balai Pertanian Baru adalah tahun ini sudah terbentuk. saat ini sedang di rancang perundang-undangnya oleh Badan Hukum sekretariat Daerah dengan target sudah rilis Perbup Baru Perundang-undangan Pembentukan Balai Pertanian Baru.

Pada saat peneliti melakukan penelitian terhadap informan terdapat satu informan salah satu penyuluh di daerah Sukajaya tersebut memberikan tanggapan Implementasi Kebijakan dengan pembentukan Balai Pertanian Baru adalah salah satu hal yang dinanti-nanti serta ditunggu-tunggu dikarenakan salah satu jarak yang menjadi faktor terkendalanya para penyuluh untuk berangkat ke lokasi yang cukup jauh. Tentunya dengan adanya implementasi kebijakan baru ini para penyuluh yang bertugas di wilayah tersebut merasa sangat senang karena para penyuluh tidak lagi harus membuang waktu dalam perjalanan yang sangat lama

dan para penyuluh bisa lebih mengefisienkan waktunya untuk fokus terhadap para petani.

Dalam hal ini pihak Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Pembentukan Prodak Hukum yang membantu dalam pembentukan Perbup baru sudah sampai tahap revisi perbup. Sebagai fungsi pembuat prodak hukum penyelenggara selalu melakukan koordinasi kepada bagian organisasi untuk memastikan benar atau tidaknya prodak hukum yang sedang di rancang.

Adapun target pengerjaan pembuatan prodak hukum yaitu dalam semester 1 tahun 2024, hal ini dilakukan agar target prodak hukum tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh setiap Balai Pertanian yang ada di daerah Kabupaten Bogor. Hal ini diketahui oleh petugas maupun pelaksana yang melaksanakan pembuatan, pengawasan, serta yang mengajukan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dimensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kunci utama yang memiliki kekuatan dalam percepatan pembuatan prodak hukum maupun implementasinya. Dalam pelaksanaan program pembentukan Balai Pertanian baru perlu adanya keterlibatan masyarakat tani sekitar yang berperan sangat penting dalam proses pertanian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini informan menjelaskan keterkaitan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini adalah Masyarakat Tani, Perangkat Desa, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor. Keterlibatan masyarakat sekitar wilayah yang sedang dibicarakan tersebut tidak terlalu terlibat semua didalamnya, hanya beberapa masyarakat yang bekerja sebagai seorang petani dalam wilayah tersebut.

Salah satu informan yaitu Bapak Akbar selaku penyuluh di daerah Sukajaya mengatakan bahwa beliau sangat menunggu-nunggu balai pertanian ke 13 ini segeranya dibentuk. Melihat para petani yang banyak membutuhkan para penyuluh untuk keberlangsungan pemanfaatan hasil tani yang maksimal dan menguntungkan

banyak masyarakat. Informan yang bekerja sebagai seorang penyuluh tersebut menyampaikan pembentukan balai pertanian baru ini sangat baik bagi keberlangsungannya hidup para petani.

Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 2 informan yang membentuk Perbup dan melaksanakan Balai Pertanian Baru yang ke-13 tersebut menjawab bahwa dalam pelaksanaan program Pembentukan Balai Pertanian Baru yang ke-13 untuk wilayah pertengahan wilayah Nanggung dan Sukajaya pihak Bagian Organisasi maupun Pembentukan Prodak Hukum dan salah satu penyuluh bekerjasama untuk percepatan pengesahan prodak hukum dan pembentukan Balai tersebut. Dengan adanya selalu melakukan koordinasi antar lembaga berpengaruh terhadap percepatan pembentukan program yang sedang dirancang saat ini.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa pembentukan Balai Pertanian yang ke-13 untuk wilayah pertengahan Nanggung dan Sukajaya mempercepat target pembentukan balai berjalan dengan sangat baik dan lancar. Sebab dalam melaksanakan pembentukan balai ini selalu melakukan koordinasi yang cukup efektif.

Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bogor di fasilitasi dan diselenggarakan di ruangan rapat IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Dalam rapat ini Dinas Pertanian Kab.Bogor menjelaskan beberapa aspirasi yang ingin di sampaikan, salah satunya adalah pembuatan Balai Pertanian Baru yang ke-13 dan beberapa fasilitas yang kurang dalam balai yang sudah berdiri saat ini.

Beberapa hal yang disampaikan oleh salah satu perwakilan Dinas Pertanian tersebut menyampaikan tentang fungsi wewenang dan peralihan penatalaksana

penyuluhan, mengaitkan antar BPP Nanggung dan Sukajaya, tentang Kostratani, dan alokasi PPS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan hal-hal yang cukup baik dan komunikatif dalam komunikasi antar organisasi para lembaga.

Dimensi Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang dilakukan oleh pihak pelaksana sebagai bukti serta bentuk kesiapan terhadap melaksanakan program ini dengan mengerjakan tugasnya secara semestinya. Pihak sekretariat daerah selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan untuk segera meriliskan prodak hukum sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan.

Informasi yang diterima oleh peneliti yaitu dari beberapa sumber yaitu salah satu pegawai Bagian Organisasi dan pegawai Pembuat Prodak Hukum.

Dimensi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari informan yang ada di lapangan, peneliti tidak melihat permasalahan sosial karena faktor ekonomi, rata-rata masyarakat merasakan hal yang cukup. Namun, bertani adalah salah satu sumber mata pencaharian mereka agar mereka tetap melangsungkan hidup yang makmur dengan cara bertani. Permasalahan dalam hal ini hanya saja jarak bagi para penyuluh untuk membantu para petani cukup jauh dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dalam pengertian yang luas, penyuluh adalah seorang yang ditugaskan untuk membimbing dan memberi ilmu pengetahuan berkaitan dengan bertani kepada para petani. Para petani bisa memanfaatkan keilmuan para penyuluh untuk keberlangsungan hasil tani mereka agar mendapatkan nilai lebih ketika pasca panen nanti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Perbup Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pertanian Terkini Dalam Pengembangan Balai Pertanian Di Sekretariat Daerah dapat disimpulkan bahwa :

1. Regulasi dan Struktur Organisasi : Untuk mendirikan lembaga baru dalam sektor pertanian, diperlukan peraturan yang ketat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Struktur organisasi lembaga pertanian harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, termasuk keberadaan Badan PPSDMP di Pusat, Dinas Pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan..
2. Implementasi Kebijakan : Penyambutan yang positif dari para penyuluh dan masyarakat tani terhadap pembentukan Balai Pertanian baru di wilayah antara Balai Pertanian Nanggung dan Balai Pertanian Sukajaya diharapkan akan meningkatkan efisiensi waktu dan pelayanan kepada petani, serta mengoptimalkan hasil pertanian.
3. Sumber Daya Manusia : Peran serta masyarakat tani, perangkat desa, serta instansi terkait seperti Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian sangatlah penting dalam pelaksanaan program pembentukan Balai Pertanian baru. Meskipun tidak semua masyarakat terlibat secara langsung, partisipasi mereka dianggap krusial untuk keberhasilan program ini.
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana : Koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Bagian Organisasi dan Pembentukan Prodak Hukum, serta kerjasama dengan penyuluh pertanian, memainkan peran penting dalam percepatan pembentukan Balai Pertanian baru. Kolaborasi yang efektif memungkinkan jalannya program dengan lancar.
5. Komunikasi Antar Organisasi : Rapat koordinasi antara Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor berlangsung dengan baik dan informatif. Diskusi mengenai aspirasi dan kebutuhan terkait pembentukan Balai Pertanian

baru dijalankan secara jelas, menunjukkan adanya komunikasi yang efektif antar organisasi terkait.

6. Sikap Para Pelaksana : Pihak pelaksana, termasuk Sekretariat Daerah dan pegawai terkait, menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam menjalankan program pembentukan Balai Pertanian baru. Kerja sama yang solid di antara mereka mendukung percepatan pengesahan peraturan yang diperlukan.
7. Lingkungan Sosial dan Ekonomi : Meskipun tidak terjadi permasalahan sosial yang signifikan, aspek ekonomi tetap menjadi perhatian, terutama dalam hal pemanfaatan waktu dan akses para penyuluh ke lokasi pertanian. Peran penyuluh dalam memberikan pengetahuan kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dengan demikian, pembentukan Balai Pertanian baru di wilayah tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi para petani dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyuluhan pertanian di daerah tersebut.

REFERENSI

- Ahdah Winarsih, Djaka Mastuti, Detia Tri Yunandar. 2020. Peningkatan Kinerja Melalui Program Kostratani Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prafi, Kabupaten Manokwari. 58-67.
- Novianda Fawaz Khairunnisa, Zumi Saidah, Heki Hapsari, Elina Wulandari. 2021. Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Tingkat Produksi Usahatani Jagung The Agricultural Extension Agent's Role on The Level Of Corn Farming Production. 113-125.
- Eliga Paginian, Dewi Kurniati Abdul Hamid A.Yusra. 2021. Strategi Peningkatan Kinerja Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Landak.
- Oeng Anwarudin, Sumardjo Sumardjo, Arif Satria, Anna Fatchiya. 2020. Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Petani Muda Di Kabupaten Majalengka. 17-36.

Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 8 (2024), e-ISSN 2963-590X | Suryaningsih et al.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 mengenai Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan